

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (www.pajak.go.id). Perusahaan manufaktur juga wajib membayar pajak. Pajak tersebut akan mengurangi laba yang diterima perusahaan sehingga secara otomatis dana perusahaan akan berkurang. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan suatu cara untuk memenuhi sumber dana yang dibutuhkan.

Perusahaan membutuhkan dana yang besar dalam mendanai belanja modal perusahaan (Natalia 2016). Untuk mendapatkan sumber dana yang besar ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan. Salah satu alternatif yang cukup umum dilakukan adalah dengan hutang. Perusahaan cenderung menggunakan hutang sebagai salah satu sumber dananya. Hutang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan perusahaan sehingga hutang menjadi alternatif umum bagi perusahaan untuk pengembangan dan pelebaran perusahaan. Namun, perusahaan tidak boleh gegabah dalam berhutang. Di samping kegunaan positifnya untuk pendanaan, berhutang dapat meningkatkan risiko karena hutang

mengakibatkan beban biaya kebangkrutan semakin tinggi. Jika manajer tidak berhati-hati dalam berhutang, maka akan mengancam likuiditas perusahaan. Terdapat perusahaan-perusahaan Indonesia yang bangkrut akibat hutang, salah satunya adalah PT Nyonya Meneer. Dilansir dari ekonomi.kompas.com (2017), PT Nyonya Meener dinyatakan pailit karena tidak bisa membayar hutang kepada kreditornya. Terdapat 35 kreditor yang menggugat PT Nyonya Meneer karena tidak bisa membayarkan hutangnya. Untuk itu diperlukan kebijakan hutang yang tepat agar dana dari hutang tepat guna dan mampu terbayarkan. Fenomena serupa juga terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA). Perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi makanan ini telah dinyatakan pailit pada tahun 2018 dan masih tidak mampu membayarkan hutangnya hingga saat ini. Berdasarkan fenomena-fenomena ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan hutang harus diperhitungkan dengan matang karena jika salah langkah dapat menimbulkan kebangkrutan perusahaan.

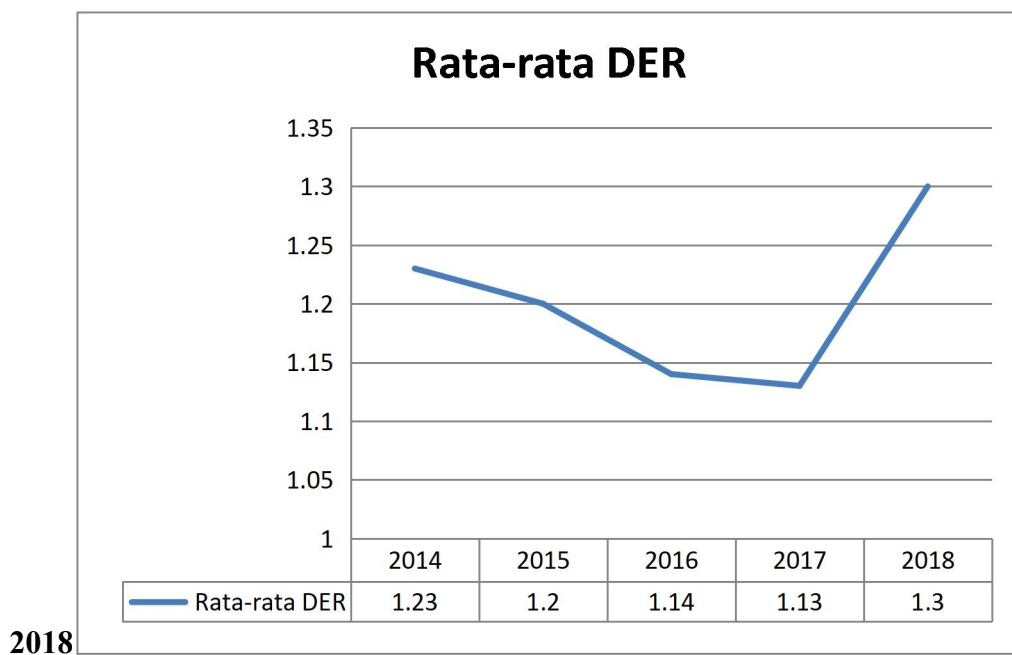
Hutang merupakan semua kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang merupakan sumber modal atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor (Putra dan Ramadhani 2017). Hutang merupakan suatu mekanisme lain yang bisa digunakan untuk mengurangi atau mengontrol konflik keagenan. Kebijakan hutang merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mendanai kegiatan operasional dengan modal yang berasal dari hutang. Ketersediaan sumber dana maupun modal sangat mempengaruhi kelangsungan hidup maupun kesempatan berkembang perusahaan.

Terdapat fenomena perbandingan kebijakan hutang dari perusahaan manufaktur di Indonesia:

Grafik 1.1

Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur di Indonesia

Tahun 2014-



Sumber: www.idx.co.id (data diolah)

Data yang digunakan dalam grafik ini adalah rata-rata DER perusahaan manufaktur periode 2014-2018 yang tidak bernilai negatif. Berdasarkan data pada grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan atau penurunan setiap tahunnya pada kebijakan hutang perusahaan manufaktur yang dihitung berdasarkan *Debt to Equity Ratio* (DER). Dari tahun 2014 hingga tahun 2017 terjadi penurunan kebijakan hutang. Namun, pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup tajam yang nilainya bahkan lebih tinggi daripada nilai pada tahun 2014. Berdasarkan

fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perusahaan untuk berhutang tidak bisa dipastikan akan terus meningkat atau menurun ataupun juga stabil setiap tahunnya. Terdapat kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi kebijakan hutang sehingga kebijakan hutang yang dilakukan oleh setiap perusahaan bisa berbeda-beda.

Menurut beberapa hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang adalah struktur aktiva (Rajagukguk, Wdyastuty, dan Pakpahan 2017). Hasil penelitian serupa juga didapatkan oleh (Wahyuni, Ahyaruddin, dan Asnawi 2016). Struktur aktiva dapat mempengaruhi kebijakan hutang karena jumlah kekayaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang yang dilakukan oleh perusahaan. Ada tiga definisi aktiva yang dikemukakan oleh para profesional di Amerika Serikat. Definisi pertama adalah sesuatu yang disajikan disaldo debit dan akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip akuntansi (bukan saldo negatif yang akan dinilai sebagai hutang), saldo debit ini merupakan hak milik atau nilai yang didebet atau pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang. Kedua, aktiva adalah sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Ketiga, aktiva adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai dimasa yang akan datang oleh kesatuan tertentu sebagai akibat atau kejadian yang telah lalu (Fahmi dan Yustrianthe 2015).

Selain struktur aktiva, ada faktor lain yang juga mempengaruhi kebijakan hutang, yaitu tarif pajak (Lin 2016). Hasil penelitian serupa juga didapati oleh

(Clemente-Almendros dan Sogorb-Mira 2016). Semakin besar jumlah hutang yang digunakan sebagai sumber pendanaan maka akan semakin besar pula biaya atau beban bunga yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak. (Sukma Alfandia 2018) menyatakan bahwa sebagian besar literatur menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih pendanaan dengan hutang karena pembayaran bunga merupakan pengurang yang diperbolehkan secara perpajakan.

Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan hutang adalah kebijakan dividen (Yunandriatna dan Ifada 2017). Hasil penelitian serupa juga didapatkan oleh (Putra dan Ramadhani 2017). Kebijakan dividen adalah kebijakan yang sengaja dibuat oleh manajer untuk menentukan porsi kas yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen membutuhkan tambahan dana menggunakan hutang untuk membagikan dividen kepada pemegang saham. Ada suatu kasus yang kemungkinan mendukung teori ini. Tahun 2016 (investasi.kontan.co.id/), PT Unilever Tbk mengalami penurunan laba. Namun, dividen yang dibayarkan oleh PT Unilever Tbk tersebut malah naik hingga DPR-nya nyaris 100%. PT Unilever Tbk mengaku bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas margin. Namun, jika melihat dari laporan keuangan PT Unilever Tbk, sebenarnya tidak hanya 2016 saja yang DPR-nya hampir 100%, tetapi juga pada tahun 2015 dan 2017. Pada 3 tahun yang sama, jumlah hutang PT Unilever Tbk juga mengalami peningkatan. Di tahun 2015, pertumbuhan jumlah hutang PT Unilever Tbk meningkat 10,15%. Di tahun 2016, jumlah hutang PT Unilever Tbk meningkat sebesar 10,45%. Di tahun 2017, jumlah hutang PT Unilever Tbk meningkat lagi sebesar 14,05%. Dari fenomena ini dapat

disimpulkan bahwa ada kemungkinan PT Unilever Tbk memanfaatkan hutangnya untuk membayarkan dividen demi menjaga kualitas marginnya.

Risiko bisnis adalah adanya ketidakpastian proyeksi pendapatan di masa mendatang (Husna dan Wahyudi 2016). Risiko bisnis ini berkaitan dengan ketidakpastian dalam pendapatan yang diperoleh perusahaan. Menurut Prathiwi dan (Prathiwi dan Yadnya 2017) risiko bisnis mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Hasil serupa juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Megawati dan Kurnia 2015). Artinya, semakin kecil risiko bisnis suatu perusahaan maka akan semakin mudah perusahaan mendapatkan pinjaman hutang. Selain faktor-faktor di atas, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi kebijakan hutang. Faktor tersebut adalah pertumbuhan penjualan. Menurut (Brigham dan Houston 2015) suatu perusahaan yang penjualannya pesat cenderung lebih banyak menggunakan hutang daripada perusahaan yang penjualannya lambat.

Menurut (Utami 2017) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Hasil serupa juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati 2016). Hal ini berarti semakin tinggi kenaikan pertumbuhan penjualan maka perusahaan akan semakin cenderung menggunakan hutang sebagai sumber modalnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pertumbuhan penjualan sebagai variabel kontrol penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang adalah struktur aktiva, tarif

pajak, kebijakan dividen dan risiko bisnis dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel kontrol.

Namun, tidak semua peneliti berpendapat sama. Menurut (Mardiyati, Qothrunnada, dan Kurnianti 2018), struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Kemudian menurut (Wahyuni, Ahyaruddin, dan Asnawi 2016), tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Selain itu, menurut (Rajagukguk, Wdyastuty, dan Pakpahan 2017), kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Ada juga menurut (Natalia 2016), risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Berdasarkan uraian di atas, terdapat pertentangan dari hasil penelitian sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Struktur Aktiva, Tarif Pajak, Kebijakan Dividen dan Risiko Bisnis terhadap Kebijakan Hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Kebijakan hutang yang tidak tepat cenderung berakibat kebangkrutan
2. Kurangnya kesadaran perusahaan terhadap aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan hutang
3. Minimnya pengetahuan perusahaan akan aspek-aspek yang mempengaruhi kebijakan hutang
4. Kurangnya perhitungan matang dari perusahaan dalam aspek kebijakan hutang.

5. Adanya kecenderungan membayarkan dividen perusahaan dengan berhutang.
6. Adanya kecenderungan mengecilkan pajak dengan hutang.
7. Adanya kecenderungan perusahaan menaikkan nilai asetnya dengan hutang.
8. Adanya kecenderungan peningkatan risiko bisnis dengan berhutang.
9. Adanya kecenderungan berhutang untuk menjaga *image* perusahaan.
10. Adanya kecenderungan berhutang untuk memenuhi kepentingan yang lain.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang, maka penulis membatasi penelitian ini dengan hanya meneliti pada bagian:

“Pengaruh Struktur Aktiva, Tarif Pajak, Kebijakan Dividen dan Risiko Bisnis, terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018”.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaruh struktur aktiva terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?

4. Bagaimana pengaruh risiko bisnis terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh struktur aktiva terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh tarif pajak terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh risiko bisnis terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Emiten

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan pembelajaran dalam menambah wawasan untuk menetapkan kebijakan hutang.

2. Bagi akademis

Sebagai tambahan referensi dan inspirasi bagi peneliti lain yang berminat untuk mengkaji bidang yang serupa dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang kebijakan hutang.